

The Influence Of Internal Control Systems And Accountability On The Quality Of Local Government Financial Reports With Organizational Culture As Moderator

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi

Eksanti Rahmi Ramadhani^{1*}, Nirwana^{2*}, Asri Usman³

Universitas Hasanuddin^{1,2,3}

shanti.rahmi@gmail.com¹, nirwana_ni@yahoo.com², asriusman@unhas.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

The existence of increasing demands for regional financial management has implications for the management of local government agencies in providing information to the public, namely in the form of quality financial reports. Local government financial reports (LKPD) are an important component as a form of information to the public about how the government is responsible for all its performance processes in government agencies. Quality financial reports are a representation of good regional financial management. This research is a type of quantitative research and the objects of research are agency employees who prepare financial reports in the Barru Regency area. Data collection techniques using a questionnaire as many as 122 respondents. This study aims to explain and analyze the effect of internal control and accountability systems on the quality of local government financial reports with organizational culture as moderation. The results of analysis and testing of data to test the hypotheses proposed in this study, several conclusions can be drawn, including: (1) the internal control system has a positive effect on the quality of LKPD. (2) accountability has a positive effect on the quality of LKPD. (3) organizational culture strengthens the relationship between the internal control system and the quality of LKPD. (4) organizational culture is not able to strengthen the relationship of accountability to the quality of LKPD.

Keywords: *Quality of Financial Statements, Internal Control Systems, Accountability, Organizational Culture*

ABSTRAK

Adanya tuntutan yang semakin meningkat akan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi pada manajemen instansi pemerintah daerah dalam memberikan informasi terhadap publik, yaitu berupa laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan komponen penting sebagai bentuk informasi kepada publik bagaimana pemerintah bertanggungjawab terhadap segala proses kerjanya dalam instansi pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas adalah representasi dari manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan objek penelitiannya adalah para pegawai instansi yang melakukan penyusunan laporan keuangan di wilayah Kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebanyak 122 responden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan budaya organisasi sebagai moderasi. Hasil analisis dan pengujian data untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: (1) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. (2) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. (3) budaya organisasi memperkuat hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD. (4) budaya organisasi tidak mampu memperkuat hubungan akuntabilitas terhadap kualitas LKPD.

Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Budaya Organisasi

1. Pendahuluan

Dalam usaha meningkatkan manajemen keuangan daerah, pemerintah daerah perlu menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai ukuran kinerja organisasi untuk menentukan apakah berjalan dengan efektif dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan (Kurniawan, 2016). Menurut PP-RI Nomor 71 Tahun 2010, syarat laporan keuangan pemerintah yang layak apabila informasinya relevan, dapat dipercaya, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan hal yang krusial bagi pemda. LKPD perlu mencukupi kriteria nilai informasi yang sah (Palalangan, 2020). Kualitas laporan keuangan yang baik ditunjukkan dengan tingkat temuan kasus sistem pengendalian intern yang rendah.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas ialah salah satunya apabila dapat dibuktikan dari opini BPK dan kinerja dari pengelola ataupun pengawasan laporan keuangan. Jika BPK mengeluarkan opini WTP pada LKPD, maka dapat menjadi gambaran bahwa LKPD yang diungkapkan dan disajikan tergolong masih wajar dan berkualitas.

Tabel 1. Peningkatan Opini LKPD 2016 - 2020

Tahun	Opini LKPD			
	WTP	WDP	TMP	TW
LKPD 2016	70%	26%	4%	-
LKPD 2017	76%	21%	3%	-
LKPD 2018	82%	16%	2%	-
LKPD 2019	90%	9%	1%	-
LKPD 2020	90%	9%	0,7%	0,3%

Sumber: IHPS BPK RI Semester I tahun 2021

Peneliti menduga adanya permasalahan kualitas LKPD yaitu dimana adanya menunjukkan peningkatan opini BPK, namun faktanya terjadi peningkatan jumlah kasus yang terkait dengan kelemahan SPI dan lemahnya akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan di lapangan, dimana LKPD mendapatkan predikat WTP dalam beberapa tahun, namun masih terdapat temuan berulang seperti dalam hal menatausahakan asset, meskipun sudah menggunakan sistem, namun harus tetap juga menggunakan perhitungan secara manual. Terutama dalam menghitung beban dan akumulasi penyusutan dan harus dilakukan secara berkala. Serta pencatatan asset pada beberapa instansi masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi peningkatan kualitas pada LKPD.

Untuk menjalankan tata kelola keuangan daerah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat mengawasi dan mengevaluasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Anggadini et al., 2021; Fathia et al., 2020) sistem pengendalian intern mengacu pada pencegahan kerugian untuk mencapai efisiensi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam mengelola keuangan dengan baik, dalam instansi mesti menciptakan lingkungan pengendalian internal yang efektif serta penilaian risiko yang baik.

Selain SPI, penelitian ini melibatkan akuntabilitas sebagai variabel yang cukup penting sebagai alat untuk membentuk kualitas laporan keuangan yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan sebagaimana dalam penelitian Idawati & Eleonora (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dipandang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi publik terhadap publik. Akuntabilitas berfungsi dalam menciptakan informasi keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan di sektor publik. Sehingga hal tersebut menjadi landasan akuntabilitas diteliti dalam penelitian ini.

Budaya organisasi merupakan variabel moderasi dalam pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap kualitas LKPD. Budaya organisasi itu sendiri merupakan inti keyakinan dengan mendasari tujuan, inti, dan nilai-nilai seluruh anggota, mulai dari karyawan level terbawah sampai manajer (Rusmita & Badera, 2018). Hasil riset yang dilakukan Ramadhan & Fachruddin (2017) juga menemukan bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku karyawan mengenai efektivitas praktik akuntansi seperti: menyusun laporan, mendistribusikan laporan keuangan, integrasi informasi keuangan, dan menyediakan informasi akuntansi yang andal. Kualitas laporan keuangan menggambarkan bagaimana peran aparatur pemerintah dalam proses menyajikan laporan keuangan. Salah satu cara yang bisa di upayakan yaitu dengan cara memperkuat budaya organisasi, karena suatu budaya sangat mempengaruhi sikap anggota organisasi (Anwar, Rapika; Ishak, 2021).

Riset ini adalah replika dari riset oleh Idawati dan Eleonora (2020) tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun, perbedaan dari riset ini dan penelitian oleh Idawati dan Eleonora (2020) antara lain: 1. Dalam penelitian ini, variabel akuntabilitas berfokus pada kepentingan publik yang menuntut instansi publik perlu mementingkan akuntabilitas horizontal, tidak pada akuntabilitas vertikal saja. 2. Penelitian ini juga menambahkan budaya organisasi sebagai variabel moderasi, sebagai perilaku dalam berorganisasi yang terkait pada saat proses menyusun laporan keuangan yang dapat mewujudkan LKPD yang berkualitas.

Kontribusi utama dari penelitian ini yaitu agar dapat memperkuat riset terdahulu yang masih inkonsisten dan memperjelas penelitian sebelumnya sehingga penelitian terkait perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas LKPD. Sehingga, penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern dan sistem akuntabilitas yang dapat membantu peningkatan kualitas LKPD sehingga dapat memberikan pemantauan dan ditunjang dengan bentuk akuntabilitas lainnya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, pemerintah, serta untuk menguji pengaruh budaya organisasi pada sikap pegawai, prosedur kerja dan semangat dalam penyusunan rencana strategis dan kegiatan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hal ini yang menjadi dasar budaya organisasi dapat digunakan sebagai pemoderasi ketiga variabel tersebut. Sesuai dengan fenomena yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi.

2. Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Dalam riset ini teori yang digunakan ialah teori keagenan, yang awalnya disampaikan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976, sebagai kerangka teori yang menyeluruh. Kerangka teori dari teori agensi berpusat pada hubungan kontraktual antara entitas yang berkolaborasi, khususnya prinsipal dan agen. Teori ini menunjukkan posisi agen sebagai pemerintah dan pihak prinsipal sebagai masyarakat. Publik menuntut pemerintah bertanggung jawab (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat menilai dan mengawasi pemerintahan dalam bertindak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi kecurangan. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal yang efektif memastikan bahwa kepentingan prinsipal dapat diurus dengan baik. Selain itu, teori ini mendukung adanya aktivitas pengendalian, lingkungan pengendalian dan manajemen risiko (Kisanyanya, 2018).

Stakeholder Theory

Stakeholder theory yang dikemukakan oleh Freeman tahun 1984, *stakeholder* ialah pihak yang memiliki pengaruh atau mempengaruhi kegiatan sebuah instansi atau organisasi.

Teori stakeholder awalnya dikembangkan untuk perusahaan sektor swasta, tetapi dalam kenyataannya teori ini juga dapat diterapkan dalam sektor publik, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan manajerial dalam pemerintahan (Arifin et al., 2017). Pengelolaan kepercayaan pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Kehadiran pemangku kepentingan memiliki dampak signifikan terhadap pola pikir dan persepsi manajemen terhadap pentingnya praktik akuntansi dalam suatu entitas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD yang berkualitas yaitu memperhatikan ciri kualitatif fundamental informasi yang diperlukan yaitu relevan, keandalan dan terverifikasi, serta karakteristik kualitatif lanjutan dari informasi yaitu perbandingan, dan pengungkapan yang tepat waktu dan dapat dipahami. Laporan keuangan berperan menggambarkan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi dan kinerja pemerintah untuk periode tertentu. (Jonas & Blanchet, 2000) menyatakan bahwa pelaporan keuangan bukanlah hasil akhir, tetapi juga merupakan proses yang kualitasnya tergantung pada kualitas proses individu. (Tran et al, 2021) juga mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan dari segi konteks informasi yang merupakan kebutuhan untuk menilai pengambilan keputusan.

Sistem Pengendalian Intern

Di sektor publik, sistem pengendalian internal bertindak sebagai sistem proses dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, proses yang terjadi bukan sekadar aturan atau kebijakan untuk dijalankan dalam suatu titik waktu tertentu. Akan tetapi, itu adalah sistem yang bekerja dan saling terhubung di seluruh tingkat pada organisasi tersebut (Haron et al., 2018). Dimana sistem pengendalian intern merupakan ukuran awal dalam menemukan temuan kelemahan pada laporan keuangan, maka tugas SPI adalah bertindak dengan independen secara objektif agar mencegah segala faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan (Fathia et al., 2020). Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai alat manajemen risiko, dengan beberapa tujuan yang kompleks (S Purnomo, 2014).

Akuntabilitas

Akuntabilitas digambarkan sebagai dasar dari semua pelaporan keuangan karena pemerintah diwajibkan untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan masyarakat berhak untuk mengetahui fakta dan angkanya (GASB, 1987). Vidyasari & Suryono (2021) menjelaskan bahwa pencapaian akuntabilitas keuangan di daerah merupakan landasan awal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Tran et al (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi publik dapat dinilai secara akurat dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu tinggi. Idawati & Eleonora (2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai alat yang mencegah penyalahgunaan sarana, fasilitas, dan anggaran organisasi. Ini berarti menjalankan unsur – unsur pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dan dinilai secara objektif.

Budaya Organisasi

(Schein, 2010) mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu bentuk asumsi umum, disepakati dalam suatu grup untuk menyelesaikan persoalan dari lingkungan eksternal dan mengintegrasikannya dengan lingkungan internal. Budaya organisasi dengan berorientasi kinerja yang baik, pastinya akan mempengaruhi individu dalam meningkatkan kualitas LKPD. (Ayem & Karlina, 2021) mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai kontribusi dalam proses pelaporan keuangan memerlukan penilaian yang detail dari pihak yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian (Idawati & Eleonora, 2020) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal secara signifikan. Secara khusus merujuk pada, manajemen dalam penetapan tujuan, desain dan implementasi manajemen, pemantauan dan evaluasi manajemen. Semua pegawai instansi kemudian memainkan peran kunci dalam penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Sejalan dengan *agency theory* bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas – aktivitas pemerintahan dalam meningkatkan kualitas LKPD. Maka, sudah sepatutnya pemerintah daerah diwajibkan agar mengembangkan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya untuk tujuan memperoleh laporan WTP, tetapi juga untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional dan implementasi yang baik dari sistem pengendalian internal untuk menghasilkan LK berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palalangan, 2020), (Fathia et al, 2020), (Anggadini et al, 2021), (Sukarman & Solovida, 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Konsep akuntabilitas berakar pada pembuatan LK berkualitas tinggi yang membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang tepat (Harun, 2021). Dapat diartikan bahwa dengan peningkatan akuntabilitas juga dapat memberikan kapasitas pelaporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, pemerintah daerah perlu menyadari pentingnya membuat laporan keuangan yang terjamin kualitasnya, dengan cara merancang mekanisme akuntabilitas yang relevan, sesuai kondisi dan konteks yang dibutuhkan.

Uraian di atas sesuai dengan teori *agency* yaitu permasalahan agen (pemerintah) – prinsipal (masyarakat) dapat diselesaikan dengan adanya akuntabilitas yang dapat memastikan kepatuhan perilaku agen. Hubungan teori keagenan dengan akuntabilitas adalah menginformasikan kepada publik melalui laporan keuangan yang cenderung memudahkan manajemen pemangku kepentingan dalam melaksanakan kontrol pada akuntabilitas pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Vidyasari & Suryono (2021); Harun (2021); dan Idawati & Eleonora (2020). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SPI organisasi adalah proses yang mengendalikan praktik akuntansi untuk memenuhi tujuan pengendalian internal, pelaporan, dan pemantauan. Mekanisme pengendalian internal yang dimaksud dapat memfasilitasi pemahaman tentang batasan dan hak yang terkait dengan pekerjaan, serta teknologi informasi yang digunakan, oleh departemen sumber daya manusia. Para ahli berpendapat bahwa investigasi yang akan datang harus memprioritaskan pemeriksaan terhadap pengendalian internal dan budaya organisasi dalam kinerja OPD. Hal ini akan mewujudkan LKPD berkualitas (Yudhasena & Putri, 2019).

Budaya organisasi bukan hanya tentang seberapa suka anggota organisasi terhadap budaya tersebut, melainkan tentang mengenali karakteristik gaya hidup organisasi. Budaya organisasi menjadi acuan bagi semua anggota untuk menciptakan kedisiplinan dan kewajibannya saat kerja, baik secara personal maupun dalam kelompok. Sehingga, ada kemungkinan bahwa budaya dalam organisasi berpengaruh dalam penerapan SPI, terutama dalam meningkatkan kualitas LK. Hal ini sejalan dengan penelitian Ayem & Karlina (2021). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Budaya Organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan antara budaya organisasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas LK perlu diperhatikan. Secara khusus, nilai-nilai yang menggarisbawahi peraturan dan keuntungan adalah salah satu fitur budaya organisasi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja

organisasi (Deshpandé & Farley, 1999). Berdasarkan atribut-atribut tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berfungsi untuk membatasi karyawan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukur dalam menggapai target sebuah organisasi. Sehingga, saat menunjukkan perilaku positif dan mencapai hasil yang memuaskan, peningkatan akuntabilitas dapat dicapai, termasuk kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Penjelasan tersebut, sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa konsep akuntabilitas dalam hal ini, pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab pada atasan yang lebih tinggi, namun juga bertanggung jawab pada publik, dan masih banyak stakeholders lainnya. Maka dengan adanya budaya organisasi yang mempunyai peran sebagai acuan dan pedoman dalam menetapkan batas, identitas, komitmen, memantapkan sistem sosial serta membentuk sikap etis pegawai. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Sari, 2012. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Budaya Organisasi dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Riset ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mengungkap realitas. Dalam riset ini melibatkan 36 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Jenis sampling yang digunakan dalam riset ini ialah purposive sampling. Penelitian ini memilih sampel dengan menggunakan: 1. Pimpinan dinas, badan, dan kecamatan di kantor pemerintah yang diteliti. 2. Auditor dan pelaksana pengendalian intern pemerintah sebagai subjek penelitian. 3. Responden PTPK (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan), meliputi sekretaris, kepala bidang, dan/atau bendahara yang secara langsung menyampaikan laporan keuangan pada kantor pemerintah yang diteliti. 4. Responden yang bekerja minimal satu tahun di kantor pemerintah yang diteliti. 5. Responden sebanyak 122 orang pegawai OPD. Riset ini memakai data primer, melalui kuesioner dengan skala Likert 5 poin dengan SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2, dan STS = 1.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan responden didasarkan pada kriteria khusus untuk OPD Kabupaten Barru, yaitu pegawai ASN yang bekerja di OPD. Studi ini menargetkan individu yang memegang jabatan sebagai kepala dinas, kepala badan, auditor, camat, dan pegawai di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah. Selain itu, studi ini juga mencakup anggota PTPK, khususnya sekretaris, kepala bagian, kepala seksi, dan bendahara yang secara aktif terlibat dalam pelaporan keuangan. Peserta yang memenuhi syarat harus memiliki masa kerja minimal satu tahun di kantor pemerintah. Kumpulan data terdiri dari 122 kuesioner yang telah diproses untuk dianalisis.

Validitas instrumen diuji menggunakan korelasi Pearson, yang kemudian dibandingkan dengan nilai (r tabel). Instrumen dinyatakan valid jika nilai korelasi yang dihitung (r hitung) lebih besar dari nilai kritis (r tabel) yaitu 0,176, dengan jumlah responden (n) sebanyak 122, signifikansi 5%, dan nilai sig. (2 tailed) $0,000 < 0,05$.

Tabel 2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	Cronbach Alpha	Kesimpulan
SPI (X1)	1	0,601	0,800	Valid dan Reliabel
	2	0,611		
	3	0,526		
	4	0,518		
	5	0,653		
	6	0,643		
	7	0,562		

Variabel	Pertanyaan	r-hitung	Cronbach Alpha	Kesimpulan
	8	0,572	0,829	Valid dan Reliabel
	9	0,450		
	10	0,496		
	11	0,539		
	12	0,520		
Akuntabilitas (X2)	1	0,539		
	2	0,495		
	3	0,529		
	4	0,613		
	5	0,318		
	6	0,464		
	7	0,277		
	8	0,359		
	9	0,397		
	10	0,526		
	11	0,564		
	12	0,534		
Kualitas LKPD (Y)	1	0,503	0,825	Valid dan Reliabel
	2	0,677		
	3	0,766		
	4	0,586		
	5	0,500		
	6	0,620		
	7	0,575		
	8	0,719		
	9	0,666		
	10	0,373		
	11	0,405		
	12	0,313		
	13	0,660		
Budaya Organisasi (Z)	1	0,621	0,724	Valid dan Reliabel
	2	0,594		
	3	0,596		
	4	0,630		
	5	0,553		
	6	0,578		
	7	0,609		
	8	0,535		

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Semua variabel dapat dinyatakan valid berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 2. Hal ini terlihat dimana r hitung melampaui nilai r tabel untuk semua item. Lebih lanjut, hasil penilaian reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien Cronbach Alpha (α) melampaui ambang batas yang ditetapkan yaitu 0,60. Berdasarkan hal tersebut, bahwa alat yang diterapkan dalam riset ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi.

Tahap selanjutnya melibatkan pengujian semua hipotesis dalam penelitian. Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan *Moderated Regression Analysis* sebagai metode analisis. Analisis regresi dilaksanakan dalam dua proses. Pertama melibatkan regresi tanpa mempertimbangkan interaksi dengan variabel moderasi, sedangkan tahap kedua melibatkan regresi dengan mempertimbangkan interaksi dengan variabel moderasi.

Tabel 3. Pengujian Analisis Regresi sebelum Variabel Moderasi

Variabel	Koef.	Beta	t	Sig. t	Kesimpulan
----------	-------	------	---	--------	------------

Konst.	11,463		2,029	0,045	Sig.
Sistem Pengendalian Intern (X1)	0,697	0,545	6,326	0,000	Sig.
Akuntabilitas (X2)	0,252	0,247	2,673	0,009	Sig.
$\alpha=5\%=0,05$					
Adj. R ² = 0,486					

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Sesuai dengan hasil uji regresi yang tercantum dalam Tabel 3, sehingga model persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 11,463 + 0,697 X1 + 0,252 X2 e$$

Tabel 3 menunjukkan Adj. R² sebesar 0,486 atau 48%. Variabel SPI (X1) dan akuntabilitas (X2) mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 48%, sesuai dengan data tersebut. Faktor-faktor lain mempengaruhi sebesar 55%. Pada signifikansi 0,05, uji t menguji variabel independen terhadap variabel dependen untuk menguji hipotesis secara parsial.

Hipotesis pertama (H1)

Dalam Tabel 3, terdapat hasil uji regresi untuk variabel SPI. Nilai t hitung variabel X1 adalah 6,326, dan nilai sig. yaitu 0,045. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (6,326 > 1,657) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,045 < 0,05), maka variabel SPI (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas LKPD (Y). Pengaruh tersebut positif dengan koefisien pengendalian internal sebesar 0,697. Jadi, semakin besar SPI (X1), maka kualitas LKPD (Y) akan semakin baik, dan sebaliknya.

Hipotesis pertama (H2)

Dalam Tabel 3, terdapat hasil uji regresi untuk variabel akuntabilitas (X2). Nilai t hitung X2 adalah 2,673, nilai sig. sebesar 0,009. Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (2,673 > 1,657) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,009 < 0,05), sehingga variabel akuntabilitas (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas LKPD (Y). Koefisien akuntabilitas sebesar 0,252 memiliki tanda positif, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan (Y) meningkat seiring dengan peningkatan akuntabilitas (X2). Sebaliknya, jika akuntabilitas (X2) rendah, maka akan menurunkan kualitas LKPD (Y).

Tabel 4. Pengujian Analisis Regresi Dengan Variabel Moderasi

Variabel	Koef.	Beta	t	Sig. t	Kesimpulan
Konst.	40,781		0,592	0,555	Sig.
Sistem Pengendalian Intern (X1) *Budaya Organisasi (Z)	0,159	7,139	2,894	0,005	Sig.
Akuntabilitas (X2) *Budaya Organisasi (Z)	-0,144	-7,827	-3,247	0,002	Sig.
$\alpha=5\%=0,05$					
Adj. R ² = 0,523					

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Sesuai dengan hasil uji regresi yang tercantum dalam tabel 4, sehingga model persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = 40,781 + 0,159 X1Z - 0,144 X2Z e$$

Sesuai dengan tabel 4, koef. Adj. R² model 2 memiliki nilai sebesar 0,523 atau sebesar 52%. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel kualitas LK yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu sistem pengendalian intern (X1) dan akuntabilitas (X2), yang secara bersama-sama menjelaskan 52% dari varians yang diamati. Pengaruh ini selanjutnya dimoderasi oleh variabel budaya organisasi (Z). Sebaliknya, perlu dicatat bahwa proporsi yang signifikan sebesar 48% tampaknya diakibatkan oleh variabel tambahan yang

belum diperhitungkan di riset ini.

Hipotesis pertama (H3)

Sesuai dengan tabel 4, terdapat nilai t hitung yaitu 2,894 dan sig. yaitu 0,005 untuk variabel pengendalian sistem internal yang dimoderasi oleh budaya organisasi. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,894 > 1,657$) dan sig. t lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$), dapat diartikan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal (X1) yang dimoderasi oleh budaya organisasi (Z) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan pemerintah keuangan daerah (Y). Koefisien pada variabel SPI yang dimoderasi oleh budaya organisasi (0,159) menunjukkan nilai positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi (Z) yang memoderasi sistem pengendalian internal (X1), jadi kualitas laporan keuangan (Y) juga makin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah budaya organisasi (Z) yang memoderasi sistem pengendalian intern (X1), akan rendah pula kualitas laporan keuangan (Y).

Hipotesis pertama (H4)

Sesuai dengan tabel 4, terdapat nilai t yaitu -3,247 dan nilai sig. yaitu 0,002 untuk variabel akuntabilitas yang dimoderasi oleh budaya organisasi. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-3,247 < 1,657$) dan tingkat sig. kurang dari 5% ($0,002 < 0,05$), dapat diartikan bahwa akuntabilitas (X2) yang dimoderasi oleh budaya organisasi (Z) berpengaruh negatif terhadap variabel kualitas LKPD (Y). Nilai koefisien akuntabilitas yang dimoderasi oleh budaya organisasi (-0,144) memiliki tanda negatif, yang menunjukkan hubungan yang negatif. Ini berarti semakin rendah budaya organisasi (Z) dalam memoderasi akuntabilitas (X2), maka kualitas laporan keuangan (Y) juga akan rendah, dan sebaliknya.

Pembahasan

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Melalui temuan riset, bahwa SPI berdampak baik pada kualitas LKPD secara eksperimental, hipotesis 1 yang diajukan telah diterima. Temuan riset ini sesuai dengan prinsip-prinsip teori agensi, yaitu prinsipal dan agen berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan biaya keagenan ketika konflik kepentingan muncul. Penerapan SPI penting untuk meminimalisir biaya keagenan dan mengurangi perilaku agen yang tidak diinginkan. Mekanisme ini berfungsi untuk memperbaiki ketidakakuratan LK dengan keadaan yang sebenarnya, agar LK yang dihasilkan dapat meningkat kualitasnya. Temuan riset ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hasil ini sesuai dengan penelitian Matriano & Al-Kharusi (2022), Sandrayati et al (2021) serta Priyono & Mutmainah (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Temuan pengujian mendukung hipotesis 2. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkatkan kualitas LKPD. Riset ini sesuai dengan teori agensi, yaitu agen bertanggung jawab dan melaporkan informasi keuangan kepada prinsipal. Teori keagenan menyatakan bahwa tanggung jawab meningkatkan laporan keuangan. Kesadaran yang tinggi akan prinsip-prinsip dan pemahaman yang baik akan akuntabilitas juga dapat meningkatkan pelaporan, sehingga hak masyarakat atas informasi laporan keuangan dapat terpenuhi dan LK yang dibuat memenuhi standar kualitas peraturan. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas meningkatkan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hasil riset ini sesuai dengan penelitian Idawati & Eleonora (2020), Vidyasari & Suryono (2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Budaya organisasi memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Temuan pengujian ini mendukung hipotesis 3, yang menjelaskan bahwa budaya organisasi berperan sebagai moderator dalam pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Budaya organisasi memperkuat pengaruh SPI terhadap LKPD di Kabupaten Barru, sesuai dengan hasil penelitian ini. Hal ini dikarenakan keberadaan budaya organisasi yang kuat di instansi atau ASN pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam menerapkan SPI, sehingga kualitas LKPD dapat meningkat. Oleh karena itu, setelah terjadi interaksi antara variabel budaya organisasi dan sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru meningkat lebih signifikan dibandingkan sebelum terjadinya interaksi tersebut.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *agency theory* mendukung penggunaan budaya organisasi dalam mengatasi asimetri informasi melalui pengawasan atau sistem kontrol untuk meningkatkan kualitas LKPD. Bersama keberadaan sistem nilai bersama dalam suatu instansi, pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi secara maksimal sehingga tercipta LK yang berkualitas. Budaya organisasi yang baik juga berkontribusi pada pengendalian intern, yang pada gilirannya membantu mengatasi permasalahan keagenan di instansi publik agar memastikan LK yang dihasilkan berkualitas. Riset ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Yudhasena & Putri (2019) dan Dharu & Wahidahwati (2021).

Budaya organisasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan temuan pengujian, hipotesis 4 di terima. Budaya organisasi memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas LKPD Kabupaten Barru secara empiris. Namun, dampak moderasi tersebut bersifat negatif, artinya budaya organisasi memperlemah pengaruh akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dampak akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan tidak meningkat setelah berinteraksi dengan variabel moderasi. Temuan riset ini sejalan dengan konsep teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berhak menerima pertanggungjawaban dari ASN terhadap pengelolaan sumber daya publik yang disediakan untuk mereka. Dengan kata lain, masyarakat berhak menuntut laporan kualitas keuangan yang baik dari ASN agar pengelolaan sumber daya publik menjadi akuntabel. Hal ini sejalan dengan riset oleh Ayem & Karlina (2021) dan Patty et al (2019).

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai dampak SPI dan akuntabilitas terhadap kualitas LKPD, dengan budaya organisasi selaku faktor moderasi, dapat dikatakan bahwa SPI dan akuntabilitas memiliki dampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dampak dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD dimoderasi oleh budaya organisasi. Meskipun demikian, ketika budaya organisasi dimasukkan sebagai variabel moderasi dalam analisis dampak akuntabilitas, efek moderasi yang dihasilkan terlihat negatif. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas LKPD berkurang disebabkan adanya budaya organisasi. Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis, antara lain dapat menjadi referensi atau sumber pustaka yang berharga untuk penelitian empiris mengenai SPI, akuntabilitas, budaya organisasi, dan kualitas LKPD. Temuan riset ini bisa menjadi referensi atau ilustrasi yang berharga bagi badan atau lembaga pemerintah di Kabupaten Barru yang ingin meningkatkan kualitas LKPD mereka. Sebagian problem harus diperhitungkan pada investigasi ini. Durasi pengumpulan data menjadi lebih lama karena adanya relokasi kantor dinas tertentu,

sehingga mengharuskan peneliti untuk mengunjungi kembali kantor Inspektorat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Para peserta studi terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional, yang memiliki kesibukan masing-masing, dan sebagai penghalang bagi peneliti agar mendapatkan data yang tepat. Selain itu, ada kemungkinan bahwa para peserta memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya jujur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Anggadini, S. D., Bramasto, A., & Aulia, S. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 165–178. <https://Unibba.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Akurat/Article/View/594>
- Anwar, Rapika; Ishak, P. (2021). Determinations Affecting The Quality Of Local Government Reports With Human Resources And Organizational Culture As Moderated Variables. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(1), 94–109.
- Aries M. P, S., & Suhartono, E. (2021). Faktor Determinan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 17(2), 73–86. <https://Doi.Org/10.53845/Infokam.V17i2.295>
- Arifin, M. N., Handajani, L., & H, A. (2017). Kualitas Laporan Keuangan Dan Kepercayaan Stakeholder (Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Kerja Kppn Mataram). *Journal Of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*, 4(2), 121. <https://Doi.Org/10.21107/Jaffa.V4i2.2785>
- Ayem, S., & Karlina, L. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pt. Pegadaian Cabang Dompu Soriotu). *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1–13. <http://Ejurnal.Unim.Ac.Id/Index.Php/Prive/Article/View/1167>
- Deshpandé, R., & Farley, J. U. (1999). Executive Insights: Corporate Culture And Market Orientation: Comparing Indian And Japanese Firms. *Journal Of International Marketing*, 7(4), 111–127. <https://Doi.Org/10.1177/1069031x9900700407>
- Dharu, H. S. D., & Wahidahwati. (2021). Pengaruh Good Governance , Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Inetrnal Terhadap Kinerja Opd : Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–25.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Haron, H., Ibrahim, D. N., Jeyaraman, K., & Hock Chye, O. (2018). Determinants Of Internal Control Characteristics Influencing Voluntary And Mandatory Disclosures. *Journal Of Financial Economics*, 116(3), 139–150.
- Harun, M. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Skpd Kota Ternate). *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara*, 1(1), 83–99.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153–172. <https://Doi.Org/10.34209/Equ.V22i2.1367>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*.
- Jonas, G. J., & Blanchet, J. (2000). Assessing Quality Of Care. *Accounting Horizons*, 52(4), 255–

256. <https://doi.org/10.1097/01.Sa.0000307944.57351.7b>
- Kisanyanya, G. A. (2018). *Internal Control Systems And Financial Performance Of Public Institutions Of Higher Learning In Vihiga County, Kenya A Research Project Submitted To The School Of Business In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Award Of Degree Of Master Of Bus* (Issue May).
- Kurniawan, I. S. (2016). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 1–23.
- Matriano, M. T., & Al-Kharusi, J. K. N. Y. (2022). The Impact Of Internal Control Systems On The Quality Of Financial Reports. *Research Gate*, 10(6), 1584–1597. www.Globalscientificjournal.Com
- Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.38043/Jiab.V4i2.2260>
- Patty, M., Staf,), Jurusan, P., Politeknik, A., & Ambon, N. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kepemimpinan Transformasional Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(01), 66–82. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/224>
- Priyono, & Mutmainah, S. (2022). Determinan Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga Di Semarang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 4(1). <https://doi.org/10.47065/Ekuitas.V4i1.1858>
- Ramadhan, P., & Fachruddin, R. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 2(4).
- Rusmita, I. D. A. Y., & Badera, I. Dewa N. (2018). Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Locus Of Control Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali I Dewa Ayu Yulia Rusmita¹ I Dewa Nyoman Badera² ¹fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas , Udayana (Unud), Bali , I. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23, 1708–1735.
- S Purnomo, B. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V2i1.6581>
- Salle, A., Ec, M., Antoh, A., & Si, M. (2019). Dalam Memitigasi Persepsi Korupsi. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4, 132–156.
- Sandrayati, Faridah, & Arifin, Z. (2021). Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 19–26.
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 23–36.
- Schein, E. . (2010). Organizational Culture And Leadership, 4th Ed. In *Leadership & Organization Development Journal* (Vol. 33, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/01437731211229331>
- Sukarman, S., & Solovida, G. T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Skpd Kabupaten Tegal). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 36–43. <https://doi.org/10.35829/Magisma.V9i1.134>
- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role Of Accountability In Determining The Relationship Between Financial Reporting Quality And The Performance Of Public Organizations: Evidence From Vietnam. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 40(1), 106801. <https://doi.org/10.1016/J.Jaccpubpol.2020.106801>

- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2.
- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Opd). *E-Jurnal Akuntansi*, 434. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P17>